

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir sebagai variabel independen dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Adapun pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bulanan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh pajak yang tercatat di Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta. Metode pengambilan sampel dari populasi menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa realisasi pendapatan asli daerah, pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir.

Berdasarkan kriteria diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel penelitian ini adalah realisasi

penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir perbulan selama 36 bulan yang berasal dari pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap variabel pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data serta sebaran data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Pengukuran dilakukan dengan bantuan program aplikasi *SPSS*. Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan sebelum melakukan regresi berganda pada variabel penelitian dengan tujuan untuk meringkas informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	P.Reklame	P.Restoran	P. Parkir	PAD
Mean	420,1081	1124,4022	225,2191	9559,9873
Maximum	1326,83	2453,44	456,99	32878,89
Minimum	48,64	158,18	30,36	792,61
Std. Dev	287,45653	667,83295	133,08467	7677,16331
Observations	36	36	36	36

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

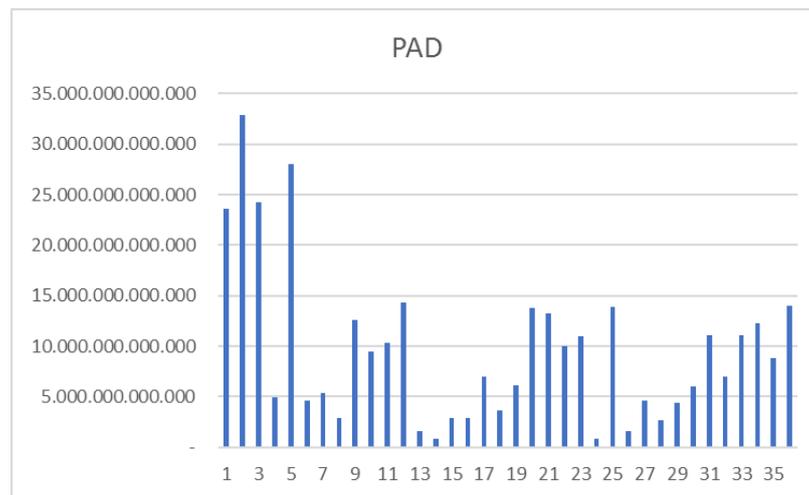
Berdasarkan hasil pengujian yang tunjukkan oleh tabel IV.1, maka dapat dijelaskan analisis statistik deskriptif seluruh periode pengamatan penelitian dengan variabel-variabel sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah didapat dari jumlah penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pajak daerah didapat dari penjumlahan pajak-pajak yang diterima oleh pemerintah DKI Jakarta termasuk didalamnya adalah pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.4 diketahui bahwa nilai standar deviasi sebesar 7677,1 yang masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 9559,9 hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada Pendapatan Asli Daerah relatif memiliki sebaran data yang baik dan terdapat variasi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Dibawah ini akan disajikan histogram untuk mengetahui pergerakan nilai pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Nomor 1 sampai dengan 36 adalah bulan pada tahun. Nomor 1 adalah bulan Januari 2014 dan nomor 36 adalah bulan Desember tahun 2016.



Sumber: Excel, Data diolah oleh penulis (2017)

Gambar IV.1

Histogram Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan gambar IV.1, hasil yang ditunjukkan pada histogram diatas menunjukkan bahwa nilai pendapatan asli daerah bergerak secara tidak beraturan selama 3 tahun setiap bulannya. Terbukti Setelah mencapai angka yang cukup tinggi pada bulan Februari 2014 yaitu 32 triliun, pendapatan asli daerah DKI Jakarta malah mengalami penurunan yang sangat drastis pada bulan april 2014 yaitu 4 triliun. Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016, nilai pendapatan asli daerah terendah terjadi pada bulan desember 2015 yaitu sekitar 792 miliar dan 1 triliun di bulan Februari 2016. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

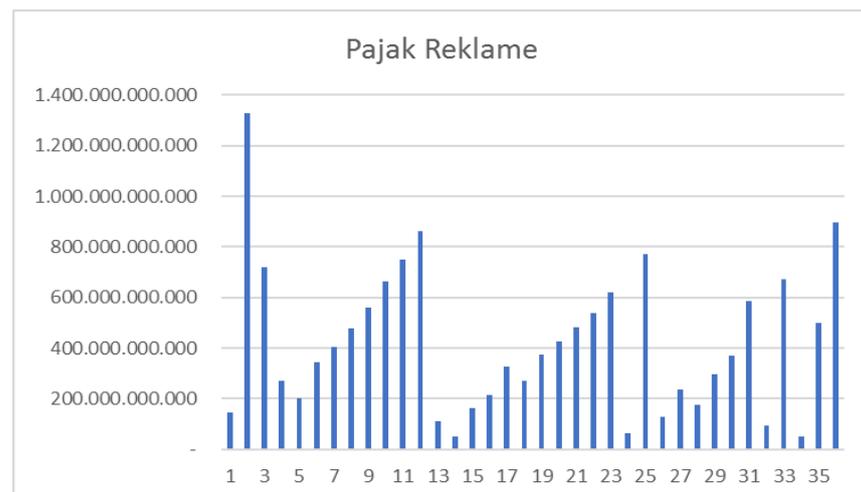
b. Pajak Reklame

Dalam rangka pengendalian dan penataan terhadap pemasangan reklame, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pajak reklame.

Pajak ini dikenakan terhadap setiap pemasangan reklame dengan luasan tertentu di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, rata-rata nilai Pajak Reklame adalah 430,1081. Adapun nilai Pajak Reklame paling tinggi adalah 1326,83 yang terjadi pada bulan Februari 2014, sedangkan nilai Pajak Reklame paling rendah adalah 48,64 yang terjadi pada bulan Februari 2015

Dibawah ini akan disajikan histogram untuk mengetahui pergerakan nilai pajak reklame yang diterima oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.



Gambar IV.2

Histogram Pajak Reklame

Sumber: Excel, Data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan gambar IV.2 diketahui bahwa nilai pajak reklame DKI Jakarta bergerak secara fluktuatif setiap bulannya selama tiga tahun. Penerimaan pajak reklame tertinggi selama tiga tahun terjadi pada bulan Februari 2014. Hal ini diimbangi juga dengan nilai pendapatan asli daerah

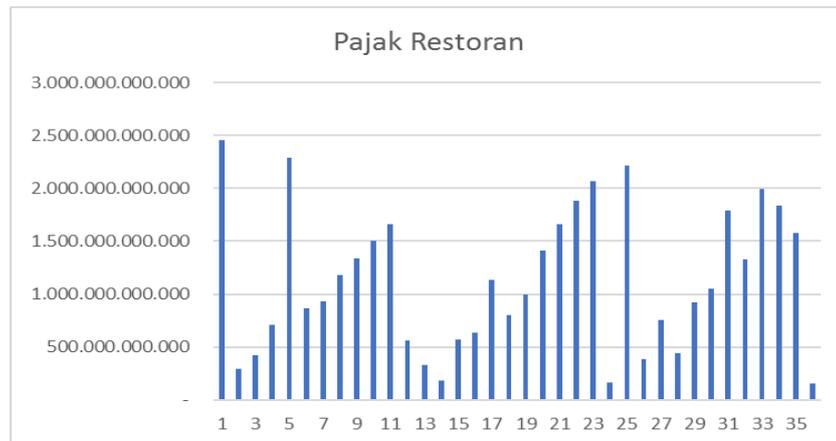
yang mencapai nilai tertinggi pada bulan Februari 2014. Sedangkan nilai pajak reklame terendah selama tiga tahun terjadi pada bulan Februari 2015. Sebenarnya nilai Pajak Reklame yang tinggi dapat diartikan dalam dua hal, yaitu efektifnya pemerintah daerah dalam mengawasi wajib pajak reklame atau kurang bagusnya tata kota DKI Jakarta, karena tata kota yang baik adalah kota yang tidak terlalu mengizinkan reklame dipasang di luar ruangan, khususnya spanduk-spanduk yang mudah rusak terkena angin dan merusak pemandangan, namun hal tersebut tidak bisa langsung dijadikan acuan karena melihat bahwa banyaknya lapisan pajak reklame termasuk reklame yang berada di dalam ruangan/mall.

c. Pajak Restoran

Jumlah penerimaan Pajak Restoran yang terlampir di data bulanan Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta diperoleh dari wajib pajak restoran yang membayar pajak restoran terutangnya atas penyelenggaraan pelayanan restoran.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1 diketahui bahwa nilai standar deviasi pada pajak restoran adalah sebesar 667,83295 dimana nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 1124,4022, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada nilai pajak restoran relatif baik.

Dibawah ini akan disajikan histogram untuk mengetahui pergerakan nilai pajak restoran yang diterima oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.



Gambar IV.3

Histogram Pajak Restoran

Sumber: Excel, Data diolah oleh penulis (2017)

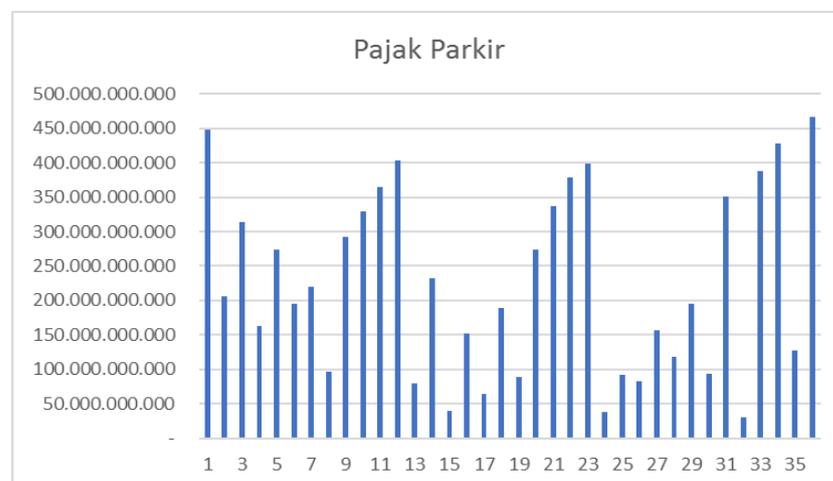
Berdasarkan gambar IV.3, diketahui bahwa nilai pajak restoran DKI Jakarta bergerak secara fluktuatif setiap bulannya selama tiga tahun. Penerimaan pajak restoran tertinggi selama tiga tahun terjadi pada bulan Januari 2014. Selanjutnya nilai pajak restoran tertinggi kedua terjadi pada bulan Mei 2014 dan tertinggi ketiga terjadi pada bulan Januari 2016. Sedangkan nilai pajak restoran terendah selama tiga tahun terjadi pada bulan Desember 2016.

d. Pajak Parkir

Pajak Parkir berbeda dengan retribusi parkir. Pajak parkir dikenakan terhadap pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh jasa parkir swasta. Jumlah penerimaan pajak parkir yang terlampir di data bulanan penerimaan pajak Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta berasal dari pembayaran pajak terutang wajib pajak parkir atas penyelenggaraan kegiatan parkir.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, diketahui bahwa nilai standar deviasi sebesar 133,08467 dimana nilai ini masih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 225,2191. Hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada pajak parkir relatif memiliki sebaran data yang baik.

Dibawah ini akan disajikan histogram untuk mengetahui pergerakan nilai pajak restoran yang diterima oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.



Gambar IV.4

Histogram Pajak Parkir

Sumber: Excel, Data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan gambar IV.4, diketahui bahwa nilai pajak parkir DKI Jakarta bergerak secara fluktuatif setiap bulannya selama tiga tahun. Penerimaan pajak parkir tertinggi selama tiga tahun terjadi pada bulan Desember 2016. Selanjutnya nilai pajak parkir tertinggi kedua terjadi pada bulan Januari 2014 dan tertinggi ketiga terjadi pada bulan Oktober 2016. Sedangkan nilai pajak restoran terendah selama tiga tahun terjadi pada bulan Agustus 2016.

Diantara ketiga pajak yang sudah disebutkan sebelumnya, pajak parkir memiliki nilai yang terkecil hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Makin berkembangnya pusat-pusat ekonomi di daerah yang berbatasan dengan Jakarta sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mempunyai pilihan tempat selain DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Terbatasnya kapasitas parkir yang disediakan oleh pengelola pusat perbelanjaan, menyebabkan munculnya parkir liar di badan jalan yang berdampak pada semakin macetnya jalan-jalan di Jakarta. Kemacetan tersebut juga berakibat pada keengganan masyarakat untuk pergi ketengah kota, terutama yang berdomisili di pingiran Jakarta.
3. Kurang efektifnya penerapan mesin parkir meteran yang sudah ditetapkan, sehingga dana parkir yang masuk tidak disetorkan langsung pajak parkirnya.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menganalisis model regresi yang dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi yang baik dan untuk memastikan bahwa model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis penelitian ini tidak memiliki masalah. Adapaun uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sampel Kolmogorov-Smirnov test* dan *normal P-Plot of regression standardized residual*. Dengan pertimbangan bahwa normalitas dapat digambarkan melalui statistik dan visual gambar sehingga menjadi lebih akurat.

Dalam penelitian ini, pada saat melakukan uji normalitas, peneliti mengalami kendala dengan hasil yang menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal. Untuk membuat data agar terdistribusi normal, maka penulis melakukan transformasi data dengan Logaritma Natural (LN) terlebih dahulu di lembar kerja excel. Sehingga untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan data yang sudah ditransformasi menggunakan LN.

1) Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas dapat menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil uji normalitas yang ditunjukkan oleh SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,56141346
Most Extreme Differences	Absolute	,139
	Positive	,139
	Negative	-,120
Test Statistic		,139
Asymp. Sig. (2-tailed)		,077 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

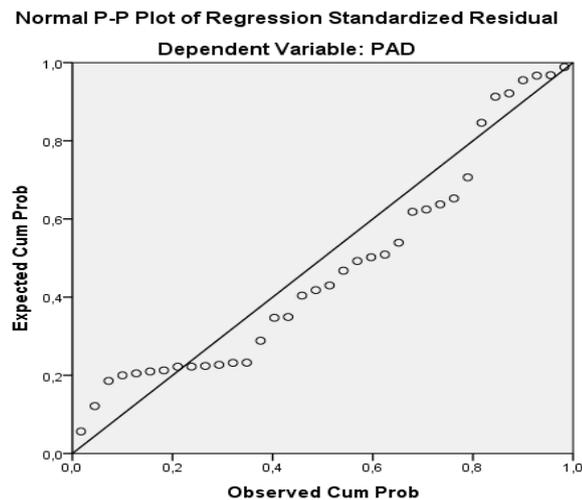
Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel IV.2 diketahui bahwa nilai ujinya lebih besar dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat bahwa hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0,077. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Normalitas Menggunakan Analisis Grafik

Untuk menentukan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, maka peneliti melakukan kembali uji normalitas. Uji normalitas selanjutnya adalah uji normalitas P-

Plot. Adapun hasil uji yang ditunjukkan SPSS adalah sebagai berikut:



Gambar IV.5

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh gambar IV.5, diketahui bahwa normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal. Gambar IV.5 memperlihatkan bahwa penyebaran titik masih mengikuti sumbu diagonal, maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen.

Model regresi yang baik yaitu tidak ada korelasi di antara korelasi antar variabel.

Salah satu kriteria menurut Ghozali (2001) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Adapun hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 REKLAME	,798	1,253
RESTORAN	,896	1,116
PARKIR	,785	1,274

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel IV.3, diketahui bahwa nilai Tolerance ketiga variabel lebih besar dari 0,10

yaitu dengan nilai pajak reklame 0,798, pajak restoran 0,896 dan nilai pajak parkir 0,785. Sedangkan untuk nilai VIF ketiga variabel lebih kecil dari 10 yaitu dengan nilai pajak reklame 1,253, pajak restoran 1,116 serta pajak parkir 1,274. maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui di dalam suatu model regresi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari nilai d yang merupakan koefisien DW.

Tabel IV.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,792 ^a	,628	,593	,58714	1,714

a. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel IV.4, diketahui bahwa nilai koefisien *Durbin-Watson* sebesar 1,714.

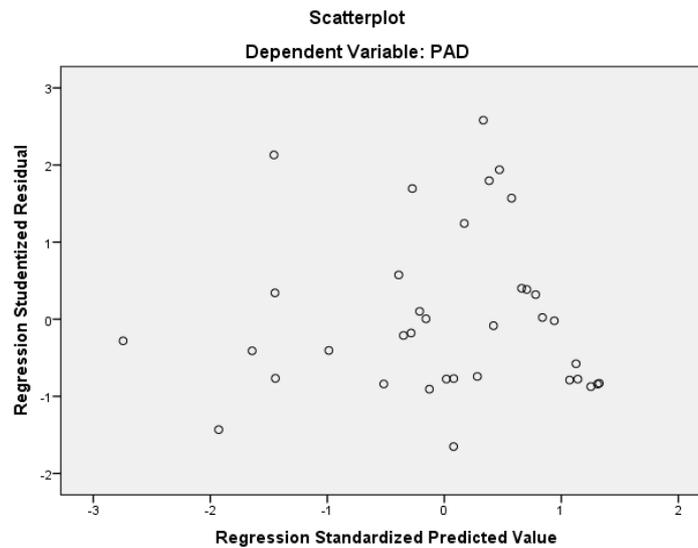
Dengan mengikuti kriteria pengukuran nilai *Durbin-Watson* yaitu $dU < DW < 4 - dU$. Oleh karena nilai DW 1,714 dan dU 1.2953 berarti tidak ada autokorelasi positif dan tidak dapat diputuskan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak memiliki masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik plot dan uji *Glejser*.

1) Hasil Uji Grafik Scatterplots

Pada uji grafik Plot, ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dari pola titik-titik pada grafik scatterplots, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada gambar IV.4 yaitu sebagai berikut:



Gambar IV.6

Hasil Uji Grafik Scatterplots

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Gambar IV.6 diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola. Titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki heteroskedasitas.

2) Hasil Uji Glejser

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan maka semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot.

Oleh sebab itu peneliti melakukan kembali uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang peneliti

lakukan adalah uji glejser. Adapun hasil uji glejser yang ditunjukkan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,111	2,710		-,041	,968
REKLAME	-,057	,079	-,139	-,723	,475
RESTORAN	-,031	,080	-,070	-,383	,704
PARKIR	,112	,088	,248	1,276	,211

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa nilai dari masing-masing variabel variabel independen berada di atas 0,05. Secara berturut-turut nilai pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir adalah 0,475, 0,704 dan 0,211. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independen terbebas dari hereroskedasitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan setelah variabel-variabel dalam penelitian telah lulus dari uji asumsi klasik. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telat terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya barulah dapat dilakukan analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda:

Tabel IV.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,625	4,581		-,791	,435
	REKLAME	,450	,133	,408	3,381	,002
	RESTORAN	,410	,136	,344	3,017	,005
	PARKIR	,384	,149	,315	2,587	,014

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian regresi regresi linier berganda pada tabel IV.6 dapat diketahui model regresi yang terbentuk antar pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = -3,625 + 0,450 (\text{REKLAME}) + 0,410 (\text{RESTORAN}) + 0,384 (\text{PARKIR}) + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Restoran = Pajak Restoran

Reklame = Pajak Reklame

Parkir = Pajak Parkir

Dari persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar $-3,625$ artinya bahwa pada saat variabel pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya PAD di DKI Jakarta sebesar $-3,625$ dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
- 2) Nilai koefisien regresi pajak reklame sebesar $0,450$, artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak reklame dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar $0,450$ dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol. Dalam uji regresi ini diketahui bahwa koefisien pajak reklame memiliki nilai tertinggi, hal ini dapat diartikan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang paling kuat dibanding variabel independen lainnya.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pajak restoran sebesar $0,410$ artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak restoran dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar $0,410$ dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.
- 4) Nilai koefisien regresi pajak parkir sebesar $0,384$, artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak parkir dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar $0,384$ dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

3. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah diperoleh dengan melakukan uji statistik t dan koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Terdapat dua cara untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel depende. Cara pertama yaitu dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat output hasil regresi. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji t juga merupakan pengujian hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Dan juga untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$Df = n - k - 1$$

Keterangan :

Df : Degree of freedom

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

maka, $Df = n - k - 1$

$$= 36 - 3 - 1$$

$$= 32$$

Dengan nilai df 32 dan signifikansi 0,05, maka nilai t tabel adalah 2,037 untuk dua sisi dan 1,694 untuk satu sisi. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel IV.7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,625	4,581		-,791	,435
	REKLAME	,450	,133	,408	3,381	,002
	RESTORAN	,410	,136	,344	3,017	,005
	PARKIR	,384	,149	,315	2,587	,014

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil tabel di atas dengan derajat kepercayaan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel yaitu $3,381 > 2,037$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan pajak reklame memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak

reklame memiliki 10 objek pajak sesuai dengan Pergub DKI Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi suatu daerah dan DKI Jakarta sebagai pusat bisnis membutuhkan reklame untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat.

2) Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil tabel di atas dengan derajat kepercayaan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $3,017 > 2,037$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Oleh karena itu, H_2 yang menyatakan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan semakin banyaknya jumlah restoran yang telah memiliki kewajiban untuk memungut pajak restoran dari konsumen, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu alasan meningkatnya pendapatan asli daerah atau dengan kata lain kondusifnya kondisi sosial politik sehingga mendukung tumbuhnya sektor pariwisata dan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak restoran.

3) Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil tabel di atas dengan derajat kepercayaan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa pajak parkir memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,587 > 2,037$ dengan nilai signifikansi 0,014. Oleh karena itu

H3 yang menyatakan pajak parkir memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak parkir memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa volume kendaraan bermotor di DKI Jakarta semakin meningkat setiap harinya serta adanya peningkatan tarif parkir. Seperti yang dilakukan pengelola parkir bernama PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking). Perusahaan tersebut menerapkan tarif parkir tinggi, perusahaan pengelola parkir itu menyesuaikan tarif parkir sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 48/2004 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di luar Badan Jalan di Provinsi DKI Jakarta. Hal itu diputuskan majelis hakim dalam persidangan pada Juni 2010.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi R^2 yang ditunjukkan pada tabel IV.6 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,792 ^a	,628	,593	,58714

a. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel IV.8, diketahui bahwa hasil *adjusted R²* dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,593 atau sebesar 59,3%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai angka variabel independen yang berupa pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah. Atau bisa dikatakan bahwa variabel pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir mempunyai pengaruh sebesar 59,3% terhadap variabel pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain variabel pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya dapat menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model yaitu pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen yaitu pendapatan asli daerah (Ghozali, 2011:98). Dengan signifikan $< 0,05$, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen.

Selain itu, jika $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak atau jika $F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan derajat kepercayaan sesuai nilai *degree of freedom*.

Dengan derajat kepercayaan 5% df_1 (jumlah variabel $- 1$) = 3, dan df_2 ($n - k - 1$) atau $36 - 3 - 1 = 32$. Hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,90. Adapun hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18,605	3	6,202	17,990	,000 ^b
Residual	11,031	32	,345		
Total	29,637	35			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh Penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai F sebesar 17,990 dengan probabilitas 0,000. Karena $F_{tabel} < F_{hitung}$ yaitu $2,90 < 17,990$ dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan asli daerah atau dapat dikatakan bahwa pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4. Analisis Tambahan

a. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

1) Pajak Reklame

Dibawah ini adalah tabel persentase kontribusi pajak reklame dari pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir.

Tabel IV.10
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Pajak Reklame	PAD	Persentase
2014	Rp6.717.684.580.045	Rp173.095.735.576.487	3,88%
2015	Rp3.637.496.650.903	Rp73.777.307.349.826	4,93%
2016	Rp4.768.709.682.444	Rp97.286.499.101.971	4,90%
Jumlah	Rp15.123.890.913.392	Rp344.159.542.028.284	4,39%
Rata-rata	Rp5.041.296.971.131	Rp114.719.847.342.761	4,39%

Sumber: Data Keuangan BPKD, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.10, diketahui rata-rata pendapatan asli daerah DKI Jakarta selama 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebesar Rp 114.719.847.342.761 dan rata-rata pajak reklame selama 2014 hingga 2016 yaitu sebesar Rp 5.041.296.971.131. Dan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2014 hingga tahun 2016 bergerak secara fluktuatif. Begitu pula dengan kontribusi yang dihasilkan, yang mengalami pergerakan yang fluktuatif, turun pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016

Kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir rata-rata sebesar 4,39%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 3,88%, nilai ini masih dibawah rata-rata kontribusi yang berarti sumbangan yang diberikan pajak reklame masih kurang. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah 4,93% dan 4,90%, nilai tersebut sudah diatas rata-rata kontribusi yang berarti sumbangan yang diberikan pajak reklame pada 2 tahun terakhir sudah cukup.

2) Pajak Restoran

Dibawah ini adalah tabel persentase kontribusi pajak restoran dari pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir.

Tabel IV.11
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Persentase
2014	Rp14.207.712.914.614	Rp173.095.735.576.487	8,21%
2015	Rp11.823.678.947.218	Rp73.777.307.349.826	16,03%
2016	Rp14.447.086.973.225	Rp97.286.499.101.971	14,85%
Jumlah	Rp40.478.478.835.057	Rp344.159.542.028.284	11,76%
Rata-rata	Rp13.492.826.278.352	Rp114.719.847.342.761	11,76%

Sumber: Data Keuangan BPKD, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.11, diketahui rata-rata pendapatan asli daerah DKI Jakarta selama 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebesar Rp 114.719.847.342.761 dan rata-rata pajak restoran selama 2014 hingga 2016 yaitu sebesar Rp 13.492.826.278.352. Dan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2014 hingga tahun 2016 bergerak secara fluktuatif. Begitu pula dengan kontribusi yang dihasilkan, yang mengalami pergerakan yang fluktuatif, turun pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016.

Kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir rata-rata sebesar 11,76%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 8,21%, nilai ini masih dibawah rata-rata kontribusi yang berarti sumbangan yang diberikan pajak restoran masih kurang. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah 16,03% dan 14,85%, nilai tersebut sudah diatas rata-rata kontribusi yang berarti

sumbangan yang diberikan pajak restoran pada 2 tahun terakhir sudah cukup tinggi.

3) Pajak Parkir

Dibawah ini adalah tabel persentase kontribusi pajak parkir dari pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir.

Tabel IV.12
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 – 2016

Tahun	Pajak Parkir	PAD	Persentase
2014	Rp3.305.850.178.064	Rp173.095.735.576.487	1,91%
2015	Rp2.273.621.118.908	Rp73.777.307.349.826	3,08%
2016	Rp2.528.415.775.221	Rp97.286.499.101.971	2,60%
Jumlah	Rp8.107.887.072.193	Rp344.159.542.028.284	2,36%
Rata-rata	Rp2.702.629.024.064	Rp114.719.847.342.761	2,36%

Sumber: Data Keuangan BPKD, data diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan tabel IV.12, diketahui rata-rata pendapatan asli daerah DKI Jakarta selama 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebesar Rp 114.719.847.342.761 dan rata-rata pajak parkir selama 2014 hingga 2016 yaitu sebesar Rp 2.702.629.024.064. Dan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2014 hingga tahun 2016 bergerak secara fluktuatif. Begitu pula dengan kontribusi yang dihasilkan, yang mengalami pergerakan yang fluktuatif, turun pada tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016.

Kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir rata-rata sebesar 2,36%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame

terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 1,91%, nilai ini masih dibawah rata-rata kontribusi yang berarti sumbangan yang diberikan pajak parkir masih kurang. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah adalah 3,08% dan 2,60%, nilai tersebut sudah diatas rata-rata kontribusi yang berarti sumbangan yang diberikan pajak reklame pada 2 tahun terakhir sudah cukup.

b. Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Korelasi pearson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1) Analisis Korelasi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis korelasi *Pearson* pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan korelasi antara pajak reklame sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Adapaun hasil atas pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Korelasi *Pearson*

		Correlations	
		REKLAME	PAD
REKLAME	Pearson Correlation	1	,631 **
	Sig. (1-tailed)		,000
	N	36	36

PAD	Pearson Correlation	,631**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: SPSS 22, data diolah penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji korelasi *Pearson* diatas, didapatkan hasil sebesar 0,631. Angka tersebut mengindikasikan bahwa korelasi antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah kuat. Sehingga, ketika pajak reklame meningkat maka kuat kemungkinan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2) Analisis Korelasi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis korelasi *Pearson* pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan korelasi antara pajak restoran sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Adapaun hasil atas pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.14
Hasil Korelasi *Pearson*

		RESTORAN	PAD
RESTORAN	Pearson Correlation	1	,539**
	Sig. (1-tailed)		,000
	N	36	36

PAD	Pearson Correlation	,539**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: SPSS 22, data diolah penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji korelasi *Pearson* diatas, didapatkan hasil sebesar 0,539. Angka tersebut mengindikasikan bahwa korelasi antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah kuat. Sehingga, ketika pajak restoran meningkat maka kuat kemungkinan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

3) Analisis Korelasi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis korelasi *Pearson* pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan korelasi antara pajak parkir sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Adapaun hasil atas pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar IV.7
Hasil Korelasi *Pearson*

		PARKIR	PAD
PARKIR	Pearson Correlation	1	,487**
	Sig. (1-tailed)		,000
	N	36	36
PAD	Pearson Correlation	,487**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	

N	36	36
---	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: SPSS 22, data diolah penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji korelasi *Pearson* diatas, didapatkan hasil sebesar 0,487. Angka tersebut mengindikasikan bahwa korelasi antara pajak parkir dengan pendapatan asli daerah hanya cukup kuat. Sehingga, ketika pajak parkir meningkat maka cukup kuat kemungkinan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Pembahasan

Hasil yang didapat penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan data keuangan bulanan DKI Jakarta selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini, variabel pajak reklame memiliki nilai signifikan sebesar 0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain dilihat dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari nilai t hitung dan t tabel, yaitu didapat nilai t hitung > t tabel (3,381 > 2,037). Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Berpengaruhnya pajak reklame dan juga kuatnya pajak reklame dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah karena DKI Jakarta merupakan pusat bisnis dimana para pebisnis membutuhkan media seperti reklame untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat serta dibantu juga dengan sudah kuatnya aparat pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame, mendata reklame, menetapkan reklame, memungut reklame dan mengawasi reklame yang tidak memiliki izin atau tidak diperpanjangnya masa reklame. Sesuai dengan ketentuan Perda DKI Jakarta No.7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Tingginya perhatian aparat pajak atas sarana prasarana bidang pengawasan dan pengendalian pajak reklame menjadi kekuatan dalam memperhatikan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR yang dipertimbangkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Adapun tarif yang dikenakan terhadap pengenaan pajak reklame juga mempunyai tarif tertinggi yaitu 25%, tarif ini tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.

Adanya hubungan yang positif dan kuat serta searah berdasarkan korelasi maka hal ini menunjukkan semakin tinggi penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta, maka pendapatan asli daerah juga semakin tinggi. Menurut Ricky (2013) hubungan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah dapat dikatakan sebuah hubungan tidak langsung karena Pajak Reklame merupakan bagian langsung dari Pajak Daerah.

Dengan hasil yang sudah diketahui, maka terlihat bahwa pajak reklame memegang peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penyelenggaraan reklame akan memberikan efek komersial bagi penyelenggara reklame tersebut karena akan banyak orang yang mengenal produk yang diperkenalkan oleh para pebisnis. Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dengan tepat dan aliran penerimaan pajak reklame digunakan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa pemungutan pajak reklame dapat memberikan peranan yang terus meningkat bagi pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah yang ada jika digunakan untuk rakyat, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini, variabel pajak restoran memiliki nilai signifikan sebesar 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain dilihat dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari nilai t hitung dan t tabel, yaitu didapat nilai t hitung > t tabel ($3,017 > 2,037$). Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Berpengaruhnya pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat disebabkan karena semakin kondisinya kondisi sosial politik sehingga

dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah restoran yang telah memiliki kewajiban untuk memungut pajak restoran dari konsumen restoran tersebut. Hal ini terbukti dengan cukup tingginya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli. Efektifnya aparat dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak restoran sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No.22 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran juga merupakan faktor tingginya jumlah penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta.

Adanya hubungan yang positif, cukup kuat dan searah berdasarkan hasil uji korelasi maka hal ini menunjukkan semakin tinggi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta, maka pendapatan asli daerah juga semakin tinggi. Serta hubungan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebuah hubungan tidak langsung karena Pajak Restoran merupakan bagian langsung dari Pajak Daerah.

Dengan hasil tersebut maka terlihat bahwa pajak restoran mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah yang ada jika digunakan untuk rakyat, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Meskipun tidak semua penelitian mendukung hasil penelitian ini, perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Rustanto (2014) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Hal ini disebabkan karena hasil pajak yang berbeda untuk setiap daerah, begitu juga dengan potensi pajak yang dilihat dari jumlah

restoran yang ada. Perbedaan ini juga disebabkan karakteristik masing-masing daerah, sebagaimana di dunia pariwisata di DKI Jakarta cukup maju pesat dengan bertambahnya penghuni hotel dan wisata kuliner, kemungkinan di daerah lain perkembangan pariwisata dan perdagangannya kurang berkembang dengan baik dan juga tergantung potensi masing-masing daerah.

3. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini, variabel pajak parkir memiliki nilai signifikan 0,014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain dilihat dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari nilai t hitung dan t tabel, yaitu didapat nilai t hitung > t tabel ($2,587 > 2,037$). Dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya oleh karena itu pemerintah daerah berusaha selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, yang salah satunya adalah pajak parkir (Mosal: 2013).

Berpengaruhnya pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah disebabkan pertumbuhan volume kendaraan di ibukota yang semakin

meningkat dan dibantu oleh kuatnya aparat dalam mengawasi kegiatan parkir saat ini sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Berbagai macam aturan dan kebijakan dibuat agar para pengguna kendaraan memarkir kendaraannya ditempat yang menggunakan meteran parkir sehingga pendapatan parkir menjadi lebih tinggi dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak parkir.

Adanya hubungan yang positif, cukup kuat dan searah berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan semakin tinggi penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta, maka pendapatan asli daerah juga semakin tinggi. Dengan hasil tersebut, maka terlihat bahwa pajak parkir mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dimana jika pemerintah daerah mampu menggunakan peluang dengan bertambahnya volume kendaraan di DKI Jakarta dan meningkatnya tarif parkir di DKI Jakarta maka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan.

Hal yang sama juga diharapkan jika pemerintah daerah mengelola peningkatan pendapatan asli daerah semata-mata digunakan untuk rakyat, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Meskipun tidak semua penelitian mendukung hasil penelitian ini, perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Mosal (2013) yang menyatakan bahwa pajak parkir kurang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Hal ini disebabkan karena hasil pajak yang berbeda untuk setiap daerah, begitu juga dengan potensi pajak yang dilihat dari jumlah volume kendaraan yang ada.

Perbedaan ini juga disebabkan oleh pengawasan penyelenggaraan kegiatan parkir yang berbeda di daerah masing-masing. Pemerintah daerah DKI Jakarta cukup tegas dalam menindak segala kegiatan penyelenggaraan parkir yang dianggap tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.

